

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di wilayah penelitian yaitu di pusat perbelanjaan dan wisata kuliner Cihampelas Walk secara umum belum terpenuhi mengingat di bciwalk terdapat puluhan bahkan ratusan tempat belanja dan memanjakan lidah. Hal ini dapat diketahui dari hasil pendataan yang dilakukan oleh penulis bahwa hanya beberapa fasilitas yang tersedia menurut ketentuan dari Permen PU No. 30/PRT/M/2006, namun untuk pemenuhan standar dari kriteria bangunan yang ideal yang memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas dirasa masih kurang karena tidak di seluruh toko dan warung makan dan seluruh pertokoan, sedangkan fasilitas lainnya masih belum disediakan dari pihak pemilik pusat perbelanjaan dan wisata kuliner Cihampelas Walk. Berikut beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh pemilik Cinema dan Yogya Supermaret, diantaranya: pintu; tangga; wastafel; lift; ramp; toilet; dan perlengkapan dan peralatan control. Penilaian dari beberapa fasilitas yang telah tersedia dengan menggunakan aspek keselamatan kemudahan, kemandirian dan kegunaan menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006, sebagai berikut:

1) Kegunaan

Pada aspek ini penilaian terhadap fasilitas yang telah tersedia dilihat dari bagaimana fasilitas yang aksesibel tersebut dapat dipergunakan bagi setiap orang termasuk penyandang disabilitas di pusat perbelanjaan dan wisata kuliner Cihampelas Walk yang bersifat umum sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006.

2) Keselamatan

Penilaian pada aspek ini dilakukan dengan melihat fasilitas yang aksesibel di pusat perbelanjaan dan wisata kuliner Cihampelas Walk dengan memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan Permen PU No.30/PRT/M/2006.

3) Kemudahan

Pada aspek kemudahan dapat, penilaiannya dengan melihat dari segi pengguna fasilitas yang aksesibel tersebut dapat mencapai semua tempat di pusat perbelanjaan dan wisata kuliner Cihampelas Walk sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006.

4) Kemandirian

Aspek kemandirian dapat dinilai dari bagaimana setiap orang termasuk penyandang disabilitas bisa mencapai, masuk dan mempergunakan fasilitas yang aksesibel tanpa membutuhkan bantuan orang lain Permen PU No.0/PRT/M/2006.

5.2 Implikasi

Dari uraian simpulan tersebut di atas juga bisa disampaikan disini mengenai tanggapan masyarakat disabilitas secara umum yaitu:

1. Fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Daksa masih kurang lengkap karena akses masuk dari *drop off* ke area ciwalk tidak terdapat Ramp.
2. Fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Netra masih kurang lengkap karena jalan pemandu tidak terdapat di dalam Pusat Perbelanjaan Cilwalk.
3. Fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Netra masih kurang lengkap karena timbul *Braille* tidak terdapat di dalam Pusat Perbelanjaan Cilwalk.
4. Fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Tuli masih kurang lengkap karena akses komunikasi yang menggunakan isyarat Bisindo tidak terdapat pada beberapa orang yang keberadaan di area Cilwalk.

5.2.1 Ekspektasi penulis

1) Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia

Penyandang disabilitas dari semua kelompok umur hidup di setiap wilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Mereka merupakan bagian dari semua suku, kelas sosial, budaya, dan agama di negara ini. Dalam lingkungan masyarakatnya, mereka seharusnya memanfaatkan fasilitas umum di sekolah-sekolah, tempat kerja, pusat perbelanjaan, lingkungan rumah, transportasi umum dan kantor-kantor pemerintah. Pengguna kursi roda, pengguna tongkat, dan pengguna bahasa isyarat, serta orang-orang yang mengalami disabilitas mental (atau tunagrahita) seharusnya menjadi bagian yang wajar dari dunia kita.

Dalam kenyataannya, sebagian besar penyandang disabilitas tak terlihat di masyarakat. Kendala lingkungan fisik menghalangi akses orang-orang dengan disabilitas tubuh (atau tunadaksa) ke ruang publik dan membatasi ruang gerak mereka.

2) Kendala teknologi menghalangi orang-orang yang mengalami disabilitas

Panduan Berinteraksi dengan Penyandang disabilitas pendengaran (atau tunarungu/Tuli) dan disabilitas penglihatan (atau tunanetra) untuk berkomunikasi. Kendala sosial dalam bentuk sikap dan tindakan menunjukkan, secara eksplisit ataupun implisit, bahwa kehadiran penyandang disabilitas tidak diterima ataupun bahwa mereka dianggap kurang mampu dibanding orang lain. Pada tanggal 30 Maret 2007, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dalam memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk memajukan hak-hak asasi penyandang disabilitas dengan menandatangani naskah Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Konvensi tersebut mengakui bahwa: "... Disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi peran serta (partisipasi) mereka di dalam masyarakat..."

Penulis memiliki ekspektasi, dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat membantu pemecahan hambatan-hambatan sikap yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam kehidupannya.

3) Etiket Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas

Hasil dari penelitian ini menimbulkan keinginan penulis untuk menerbitkan buku yang memuat beberapa kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk memajukan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Jika tidak yakin terhadap apa yang harus dilakukan dan jika tidak yakin mengenai apa yang harus dilakukan atau katakan kepada seorang penyandang disabilitas, bertanyalah padanya secara langsung bagaimana mereka ingin diperlakukan.

Memastikan adanya aksesibilitas disamping bagaimana kita bersikap terhadap penyandang disabilitas, aksesibilitas fisik dan komunikasi akan sangat membantu interaksi antara penyandang disabilitas dengan mereka yang bukan. Pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas ketika mencoba memeriksa dan memastikan apakah situasi atau lokasi tertentu aksesibel. Ingatlah bahwa penyandang disabilitas dengan suatu jenis disabilitas mungkin tidak bisa berbicara mengenai kebutuhan aksesibilitas dari penyandang disabilitas dengan jenisnya

4) Panduan Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.

Disabilitas yang lain. Apa yang aksesibel bagi tunanetra tidak akan aksesibel bagi seseorang yang menggunakan kursi roda. Kebutuhan dari seorang penyandang disabilitas sering kali sangat spesifik bukan karena jenis disabilitasnya, tetapi juga karena tingkat disabilitasnya dan juga jenis alat bantu yang digunakan, sehingga mungkin kebutuhan antara penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang sama akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Seseorang yang tidak dapat menggunakan lengannya akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mereka yang tidak dapat menggunakan kakinya. Seseorang dengan polio akan memiliki kebutuhan yang

berbeda tergantung kepada tingkat polionya, dan apakah dia memakai kruk atau kursi roda.

Setiap disabilitas mungkin membatasi kemampuan seseorang untuk bergerak atau berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tersebut kebutuhan seperti apa yang diperlukannya untuk bergerak atau berkomunikasi.

5.2.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis, maka penulis memberi rekomendasi antara lain:

1. Dibutuhkan pemahaman akan kebijakan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 yang bersangkutan dengan pentingnya menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga bagi para penyandang disabilitas dapat memperoleh haknya pada gedung perbelanjaan Cihampelas Walk kota Bandung.
2. Dari beberapa fasilitas yang telah disediakan pada gedung perbelanjaan Cihampelas Walk, diharapkan pihak gedung memperhatikan fasilitas yang sudah tersedia namun belum memenuhi standar kebijakan, sehingga akan menjamin keselamatan, kemudahan dan kemandirin bagi pengguna fasilitas tersebut khususnya untuk masyarakat penyandang disabilitas.